

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Terbentuknya interaksi antar negara di era sekarang tidak terlepas dari persoalan yang terjadi di masa lalu. Persoalan aneksasi yang dilakukan Jepang ketika terjadi perang dunia II terhadap Korea Selatan berkonsekuensi pada pencaplokan wilayah oleh Jepang, yaitu Pulau Dokdo atau Takeshima. Pasca perang dunia II, lewat kesepakatan, Jepang mengembalikan Dokdo kembali sebagai wilayah kedaulatan Korea Selatan dengan syarat kerja sama pembagian wilayah untuk penangkapan ikan dan eksploitasi sumber daya laut lainnya.

Namun, persoalan tersebut tidak selesai begitu saja. Faktor domestik Korea Selatan, yaitu masyarakatnya memiliki jiwa nasionalisme yang begitu tinggi dalam hal Dokdo. Masyarakat Korea Selatan beranggapan bahwa Dokdo lebih dari sekadar wilayah kedaulatan. Dokdo menjadi sebuah simbol terhadap perjuangan Bangsa Korea dalam menghadapi aneksasi Jepang. Sudah sejak lama, meski persoalan Dokdo telah selesai di masa lalu, masyarakat Korea Selatan masih memiliki sikap anti Jepang yang tinggi. Kondisi tersebut menjadi konsumsi bagi para politisi negara tersebut untuk menjadikan isu tersebut sebagai manuver-manuver politik domestik, baik bagi pemerintah berkuasa, oposisi, maupun organisasi-organisasi masyarakat lainnya.

Di sisi lain, persoalan Dokdo atau Takeshima juga menjadi *concern* bagi Jepang. Pada tahun 2005, Jepang mengumumkan untuk memperingati Takeshima atau Dokdo sebagai wilayah yang pernah menjadi bagian dan sampai sekarang masih menjadi wilayah yang dieksploitasi Jepang, dengan sebutan “Hari Takeshima.”

Isu “Hari Takeshima” pun tidak luput menjadi isu-isu yang mempengaruhi kestabilan politik domestik dan penolakan oleh masyarakat Korea Selatan. Hal itu didasari bahwa Dokdo sebelum perang dunia II memang milik Korea Selatan dan telah kembali ke Korea Selatan paska Perang Dunia II berakhir.

Dengan kata lain, persoalan Dokdo atau Takeshima menjadi isu yang dianggap telah selesai meski tetap memiliki potensi dalam merusak hubungan Korea Selatan dengan Jepang. Titik puncak kerenggangan hubungan kedua negara

mulai terjadi ketika pada tahun 2012, Presiden Korea Selatan melakukan kunjungan ke Dokdo.

Masyarakat Korea Selatan sebagian besar menyetujui langkah presidennya dalam melakukan kunjungan tersebut, namun di sisi lain, Jepang memprotes sikap Presiden Korea Selatan yang dianggap menciderai kesepakatan yang terjadi di masa lalu.

Bagi Korea Selatan, kunjungan presidennya menjadi sebuah simbol penegasan kedaulatan Korea selatan terhadap wilayahnya, namun Jepang beranggapan bahwa sikap pemerintah Korea Selatan memicu renggangnya hubungan kedua negara.

Mulai merenggangnya hubungan kedua negara, kemudian berimbas pada hubungan harmonis keduanya dalam berbagai bidang. Isu-isu penjajahan Jepang yang dianggap kejam semakin gencar bermunculan, di sisi lain, buku teks pelajaran di Jepang menjelaskan, secara historis, bahwa Takeshima menjadi simbol kemenangan Jepang terhadap Korea Selatan. Hal itu dianggap sebagai distorsi sejarah oleh masyarakat dan pemerintah Korea Selatan.

Hubungan antara kedua negara yang semakin merenggang, berakibat pada kestabilan politik dan ekonomi kedua negara, terutama Korea Selatan. Posisi Jepang sebagai kekuatan ekonomi amat dibutuhkan Korea Selatan, terlebih konstelasi Kawasan Asia Timur, wilayah dimana kedua negara berada, memiliki dinamika keamanan yang rentan terhadap instabilitas, terutama ancaman keamanan nuklir Korea Utara.

Di sisi lain, aktor non kawasan yaitu Amerika Serikat (AS), juga memiliki kepentingan keamanan di wilayah tersebut mengingat persoalan nuklir yang telah lama menjadi *concern* AS, selain keberadaan Cina yang memberikan rivalitas bagi pengaruh AS di kawasan. Dengan kata lain, AS juga memiliki kepentingan dalam menjaga hubungan kedua sekutunya pada situasi yang harmonis.

Melalui kepentingan nasionalnya, dan dukungan dari AS, Korea Selatan mencoba menyelesaikan persoalan sengketa wilayah dengan Jepang yang dianggap sebagai sumber konflik kedua negara. Status Pulau Dokdo/Takeshima diantara Korea Selatan dan Jepang yang dipersengketakan kedua negara adalah

status kedaulatannya, dimana kedua negara mengklaim berdasarkan konektivitas secara geografis dan historis atas kepemilikan pulau tersebut. Dokdo adalah pulau yang terletak kira-kira di pertengahan antara Semenanjung Korea dan Kepulauan Jepang (pada 37° 14 26,8" N dan 131° 52 10,4" E). Gugusan pulau karang yang disebut Dokdo oleh Korea Selatan, dan Takhesima oleh Jepang sebenarnya sengketa yang muncul sejak berakhirnya Perang Dunia II.

Korea Selatan mengklaim bahwa Pulau Dokdo berada di bawah kedaulatannya berdasar pada acuan historis yang dikutip dalam beberapa dokumentasi pemerintah Korea Selatan, yang menyatakan bahwa Dokdo pada awalnya merupakan suatu *independent island* yang dinamakan *Ussankuk* dan telah bersatu dengan Korea Selatan pada masa Dinasti *Shilla* pada tahun 512 SM. Berdasarkan dokumentasi tersebut kepemilikan Pulau Dokdo sebagai wilayah Korea Selatan muncul setelah adanya ekspedisi yang dilakukan oleh negara Perancis di bawah komando F.G. Jean, yang menyatakan bahwa Dokdo berada di wilayah Semenanjung Korea di bawah teritorial Korea Selatan. Untuk itu Korea Selatan mengklaim bahwa pengakuan kedaulatan Dokdo dilakukan lebih awal dibandingkan dengan pengakuan Jepang atas Takeshima.

Setelah berakhirnya Perang Dunia ke II dan kekalahan Jepang secara otomatis wilayah yang dulu menjadi jajahan Jepang dikembalikan kepada Negara/wilayah yang berkuasa sebelumnya, bukti kesepakatan pengembalian bekas kolonialisme Jepang terdapat pada perjanjian San Fransisco. Pada versi awal draf perjanjian San Fransisco pada tahun 1949 tertuang bahwa Amerika Serikat akan mengembalikan sepenuhnya kepemilikan penuh atas Pulau Dokdo ke tangan Korea Selatan.

Pertikaian tentang Dokdo muncul dalam San Francisco Peace Treaty, yang ditandatangani pada 8 September 1951. Pada awalnya, kebijakan Sekutu mengenai kedaulatan Dokdo jelas: Jepang harus melepaskan kedaulatannya atas Dokdo. Lima draf pertama Perjanjian mensyaratkan bahwa Dokdo harus dikembalikan ke Korea.

Namun, pada tahun 1996 Korea Selatan dan Jepang sama-sama telah mendeklarasikan dan menyepakati Lebar Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Jepang

yang berbatasan langsung dengan Korea Selatan termasuk wilayah pulau Dokdo. Perundingan antara kedua Negara dilakukan dengan diplomasi karena Jepang dan Korea Selatan menganggap wilayah laut mereka tidak terlalu luas, dari tidak luasnya serta masih adanya wilayah yang tumpang tindih antar kedua Negara yang membuat pertemuan diselenggarakan demi tercapainya hasil yang jelas dari penyelesaian kepemilikan Pulau Dokdo dan kedua Negara sepakat untuk melakukan ratifikasi dan mengacu kepada aturan hukum laut yaitu UNCLOS yang dimana kedua Negara membuat garis batas laut sejauh 200 mil sebagai langkah awal untuk normalisasi hubungan kedua Negara dan memberikan akses bagi kedua Negara untuk melakukan penelitian bahkan pengembangan secara bersama seperti yang disepakati.

Meski begitu, keterlibatan Amerika Serikat (AS) dalam sengketa wilayah tersebut semakin memperuncing hubungan antara Korea Selatan dan Jepang. Ketika Amerika Serikat menolak permintaan pemerintah Korea Selatan untuk memasukkan Dokdo dalam perjanjian itu sebagai wilayah Korea, tampaknya Amerika Serikat mendukung pihak Jepang. Namun, mengingat bahwa Jepang telah melakukan segala upaya untuk mempertahankan haknya atas beberapa wilayah, yang telah diperoleh Kekaisaran Jepang sebelum dan selama Perang Dunia Kedua, termasuk Dokdo, dan Jepang memiliki pengaruh yang kuat pada proses penyusunan, kesimpulan yang lebih tepat mungkin kekuatan Sekutu, setidaknya, tidak berniat untuk menyatakan posisi mereka atas kedaulatan Dokdo.

Namun, pada tahun 2012, Presiden Korea melakukan kunjungan ke Dokdo. Kunjungan ini yang kemudian menjadi pemicu atau pemicu yang kembali membuat hubungan Korea Selatan dan Jepang bersitegang. Jepang melakukan protes atas sikap Korea Selatan yang dianggap melakukan langkah provokasi.

Persoalan-persoalan perilaku unilateral Korea Selatan ini yang dianggap Jepang sebagai langkah provokasi dan menciderai kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak. Di sisi lain, Korea Selatan memiliki argumentasi yang dianggap penting, yaitu proteksi wilayah, sumber daya alam, dan kedaulatan. Titik persoalan kedua negara dalam perkembangan terbaru, adalah

ketika pemimpin tertinggi Korea Selatan, yaitu Presiden Korea Selatan melakukan kunjungan ke Dokdo.

Bagi Jepang, kesepakatan di masa lalu, yang menekankan pada wilayah kedaulatan Dokdo yang menjadi bagian dari Korea selatan, namun langkah eksplorasi sumber daya alam yang juga dapat dilakukan Jepang sehingga pembagian wilayah dalam eksploitasi sumber daya alam di Dokdo atau Takeshima tetap berjalan. Namun dengan adanya kunjungan tersebut, kerenggangan Jepang dan Korea Selatan semakin menambah persoalan diplomatik kedua negara.

Kunjungan dan konsekuensinya selanjutnya mendominasi wacana tentang hubungan Jepang-Korea Selatan. Fokus seperti itu pada umumnya menekankan aspek-aspek negatif dan tanpa kompromi dari hubungan, daripada segi-segi yang lebih positif dan dapat dinegosiasikan.

Jepang bahkan membelanjakan lebih banyak dana publik untuk mempublikasikan klaimnya - membelanjakan 1 miliar yen (atau hampir \$ 10 juta) pada tahun 2014, meskipun sebagian dari uang ini juga dihabiskan untuk mempublikasikan klaim ke pulau-pulau Senkaku / Diaoyu yang disengketakan. Sekali lagi, kementerian luar negeri Jepang secara dramatis meningkatkan anggarannya untuk propaganda terkait pulau setelah kunjungan Lee, ketika mereka meminta tambahan 560 juta yen (\$ 7 juta) pada September 2012. (Sumber lain menyebutkan anggaran 2013 untuk propaganda terkait pulau pada 810 juta yen dan 600 juta yen.)

Faktor lain yang mempengaruhi hubungan Korea Selatan dan Jepang adalah keberadaan dan kepentingan Amerika Serikat (AS) yang notabene adalah sekutu bagi kedua negara, terutama dalam persoalan senjata nuklir Korea Utara.

Karena itu, Presiden Korea Selatan melakukan serangkaian kunjungan kenegaraan, terutama ke AS. Presiden Korea Selatan baru saja menyelesaikan kunjungan sukses ke Amerika Serikat di mana ia bertemu dengan Presiden AS Barrack Obama dan berbicara dalam sesi bersama Kongres AS. Perhatian terbesar bagi Amerika Serikat adalah hubungan antagonistik yang telah berlangsung lama antara Jepang dan Korea Selatan — termasuk sengketa wilayah yang sangat

emosional atas Kepulauan Dokdo / Takeshima yang telah lama menegangkan hubungan bilateral antara kedua negara.

Meski begitu, terkait kepentingan, hal itu tidak hanya akan tampak penting, tetapi juga penting secara strategis, baik bagi Korea Selatan dan Jepang untuk mengembangkan ikatan yang lebih dekat dalam bidang kepedulian keamanan bersama, dan memperluas ke dalam kerjasama trilateral AS-Korea Selatan-Jepang yang lebih dalam. Hal itu dianggap sangat penting bagi hubungan Korea Selatan dan Jepang untuk secara bersama tidak terpaku pada persoalan yang terjadi antara keduanya, dengan melupakan berbagai persoalan strategis lainnya.

Kebuntuan diplomasi Korea Selatan terhadap Jepang menjadikan hubungan kedua negara berada pada titik terendah. Namun, persoalan tersebut mendorong AS, sebagai sekutu kedua negara, untuk ikut terlibat. Di sisi lain, Korea Selatan menggunakan posisi dan kepentingan AS untuk melakukan diplomasi terhadap Jepang dengan memunculkan berbagai isu yang dapat dikatakan sebagai isu yang mencerminkan kepentingan bersama kedua negara.

Di sisi lain, posisi Park dalam melakukan diplomasi terhadap Jepang untuk memperbaiki hubungan yang semakin renggang, dipengaruhi oleh kondisi domestik politik Korea Selatan. Sementara, Park terus berusaha untuk mengedepankan terciptanya komunikasi antar elit politik Jepang dan Korea Selatan dalam membahas persoalan-persoalan yang dihadapi kedua negara.

Jika Presiden Korea Selatan ingin mempertahankan peringkat persetujuan yang tinggi dan tidak kehilangan kredibilitas mengenai posisinya yang keras terhadap Jepang, ia harus mempertimbangkan opini publik domestik tentang rencana keamanan masa depan dengan Jepang, bahkan di bawah tekanan AS. Namun, mengambil pendekatan yang keras ini menyebabkan ketegangan yang tidak konstruktif dalam hubungan keamanan Korea Selatan-Jepang-AS, dan pada saat ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya meningkat di Semenanjung Korea. Selain itu, peran Korea Selatan sebagai aktor yang semakin penting dalam keamanan regional menunjukkan bahwa Jepang dan Korea Selatan harus lebih banyak bekerja sama di masa depan. Keduanya adalah negara

demokrasi, memiliki nilai dan kepentingan bersama, dan masing-masing memandang Amerika Serikat sebagai mitra keamanan yang disukai. Park harus menyeimbangkan kepentingan keamanan Korea dengan oposisi domestik untuk hubungan yang lebih dekat dengan Jepang, sebuah tantangan yang sangat sulit dalam keadaan saat ini.

Persoalan isu-isu keamanan yang menjadi nilai strategis bagi Korea Selatan dalam melakukan diplomasi dianggap sejalan oleh AS berdasarkan kepentingan keamanan ketiga negara di kawasan. Persoalan isu-isu keamanan sangat penting dibahas oleh ketiga negara mengingat posisi Cina dan Korea Utara sangat membahayakan kepentingan ketiga negara, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dengan dapat mendorong Jepang menyepakati proses reunifikasi dengan Korea Selatan, maka persoalan strategis lainnya dapat diatasi dengan tidak mengorbankan kepentingan nasional lainnya.

Serangkaian masalah ini, yang disimbolkan paling nyata oleh perselisihan pulau Dokdo/Takeshima, telah mempererat hubungan bilateral selama beberapa dekade, menghambat kepentingan keamanan bersama.

Meski begitu, secara perlahan, Jepang dan Korea Selatan telah menunjukkan minat dalam mengevaluasi aliansi mereka masing-masing dengan Amerika Serikat dan merestrukturisasi aliansi untuk memenuhi kebutuhan zaman baru, tidak dapat dipungkiri bahwa kedua negara telah lalai dalam upaya mereka untuk menyesuaikan diri. Hubungan timbal balik, yang saling terkait melalui aliansi dengan Amerika Serikat di pusat, dengan persyaratan lingkungan saat ini. Jepang dan Korea Selatan harus dengan tenang meninjau kembali masa lalu mereka.

Melalui elit politiknya, Korea Selatan terus mendorong terciptanya komunikasi antar elit politik kedua negara. Tujuan dari komunikasi politik yang dibangun Korea Selatan tidak terlepas dari upaya diplomasi untuk mencairkan hubungan yang sempat renggang.

Korea Selatan tampaknya telah memainkan peran dalam memfasilitasi KTT China-Jepang-Korea Selatan pada November 2015 di Seoul, pertemuan

pertama dalam tiga setengah tahun, yang disertai oleh pertemuan puncak formal pertama antara elit politik kedua negara. Wasit pada dasarnya adalah peran minimalis yang dirancang untuk mencegah dan mengandung tindakan dan kata-kata yang dapat memperburuk hubungan bilateral.

Langkah-langkah ini seringkali efektif. Dengan adanya berbagai kesepakatan yang dihasilkan kedua negara, maka hubungan diplomatik perlahan mulai membaik. Jepang kini mulai terbuka dalam membangun diskusi dan komunikasi dengan Korea Selatan. Terlebih lagi kedua negara menyepakati untuk kembali pada kesepakatan di masa lalu, yang menegaskan esensi kedaulatan Dokdo sebagai bagian dari Korea Selatan dengan sistem eksploitasi sumber daya alam yang dikelola secara bersama.

Selain itu, diskusi dan komunikasi yang berjalan terbantu oleh keberadaan aktor di luar kawasan yang memiliki kedekatan hubungan dengan kedua negara yang selama ini telah lama menjadi sekutu dalam bidang keamanan, yaitu AS. Negara tersebut juga turut aktif untuk mendorong Korea Selatan dalam menjalankan diplomasi agar terciptanya diskusi dan komunikasi politik antara Korea Selatan dan Jepang. Perjanjian perdagangan Trans-Pacific Partnership (TPP) yang baru-baru ini disimpulkan antara Amerika Serikat, Jepang, dan sepuluh negara lain dapat memberikan peluang lain bagi Amerika Serikat untuk memperdalam hubungan Jepang-Korea Selatan. Sejak akhir 2013, Korea Selatan telah menunjukkan minatnya untuk akhirnya bergabung dengan TPP, keinginan Park untuk menjelaskan selama kunjungan Oktober 2015 ke Washington.

Korea Selatan dan Jepang membuka pembicaraan perjanjian perdagangan bebas (FTA) pada tahun 2003, tetapi mereka terhenti pada tahun 2004, sebagian besar karena kesulitan dalam hubungan keseluruhan. Negosiasi belum dibuka kembali. Karena Korea Selatan memiliki FTA dengan hampir semua peserta TPP kecuali untuk Jepang, efek terbesar TPP pada portofolio perdagangan Korea Selatan adalah penciptaan FTA Jepang-Korea Selatan yang efektif. Di sisi lain, pentingnyakemitraan keamanan trilateral AS-Korea Selatan-Jepang tidak dapat diremehkan, meskipun terdapat peluangnya serta kendala. Tetapi jika ketiga sekutu utama ini tidak dapat membentuk front persatuan pada saat perkembangan

yang tak tertandingi antara kedua Korea dan antara Amerika Serikat dan Korea Utara, dengan resiko yang sangat tinggi.

Dengan semakin eratnya hubungan aliansi ketiga negara, maka diplomasi Korea Selatan terhadap Jepang semakin mudah. Dengan mengedepankan isu-isu keamanan yang selama ini mencirikan instabilitas politik dan keamanan yang berasal dari China dan Korea Utara, diplomasi Korea Selatan terhadap Jepang semakin menunjukkan hasil yang signifikan bagi perbaikan hubungan kedua negara. Sebagai buktinya, pertemuan wakil menteri trilateral diadakan di Washington, DC, pada April 2015. Menurut pers Korea Selatan, kedua pihak sepakat untuk bertukar intelijen yang diberi label rahasia, sangat rahasia, dan rahasia. Mereka menghadapi ancaman keamanan bersama di kawasan itu, bahwa ada kebutuhan dalam meningkatkan kerja sama keamanan, dan bahwa langkah-langkah semacam itu berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas kawasan Asia-Pasifik.

Langkah diplomasi Korea Selatan yang ditujukan untuk memperkuat kembali hubungan dengan Jepang berujung pada kesepakatan keduanya untuk secara bersama memandang perlunya hubungan baik antara keduanya. Diplomasi Korea Selatan yang dimulai melalui penawaran politik dengan menggunakan isu-isu keamanan pada akhirnya mampu mendorong Jepang untuk tidak melihat Korea Selatan sebagai rival dalam persengketaan teritorial, namun lebih kepada mitra kerja sama keamanan. Langkah penawaran politik yang dilakukan Korea Selatan, mampu mendorong terciptanya pertemuan trilateral antara Korea Selatan, Jepang, dan AS.

Pertemuan trilateral tersebut tidak terlepas dari langkah diplomasi Korea Selatan untuk mendorong AS dan Jepang dalam menyikapi berbagai isu-isu keamanan yang menjadi *concern* aliansi ketiga negara di Asia Timur. Isu-isu keamanan, seperti nuklir Korea Utara. Isu-isu keamanan tersebut mendorong proses menjadi implementasi interaksi dan komunikasi yang menghasilkan keseriusan ketiga negara untuk secara bersama menghadapi persoalan keamanan, dengan mengurangi permasalahan sengketa wilayah yang terjadi antara Korea Selatan dengan Jepang. Hubungan keduanya kembali harmonis melalui

kesepakatan sengketa wilayah sesuai dengan kesepakatan di masa lalu, yaitu Dokdo tetap menjadi wilayah Korea Selatan, namun tetap dalam sistem kerja sama pembagian wilayah dalam eksploitasi kekayaan sumber daya laut di sekitar Pulau Dokdo/Takeshima.

VI.2 Saran

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yang memfokuskan pada diplomasi Korea Selatan terhadap Jepang untuk memperbaiki kerenggangan hubungan kedua negara yang disebabkan sengketa wilayah. Menariknya, penelitian ini menjelaskan dua aktor negara yang menekankan langkah kolaborasi di luar persoalan yang ada, yaitu isu-isu keamanan yang memiliki skala prioritas lebih besar dibandingkan hanya berfokus pada persoalan yang dapat menghambat kepentingan keamanan kedua negara.

Penelitian yang dilakukan ini pada akhirnya menjelaskan diplomasi Korea Selatan melalui bentuk bentuk kesepakatan sengketa wilayah serta langkah Trilateral bersama AS dan Jepang. Namun persoalan yang muncul dan menarik untuk dibahas dalam penelitian selanjutnya adalah besarnya potensi konflik selain antara Korea Selatan dan Jepang, juga terdapat permasalahan sejarah yang membuat hubungan kedua negara berada pada kerentanan hubungan yang sewaktu-waktu dapat menjadi bom waktu dalam hubungan diplomatik kedua negara.

Kesepakatan kedua negara dalam sengketa wilayah, hanya terjadi pada tataran elit saja, namun masyarakat kedua negara yang cenderung memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, terutama dalam kasus Dokdo atau Takeshima, menjadi persoalan domestik masing-masing negara yang berujung pada sikap kebencian. Masyarakat Korea Selatan yang anti Jepang, sementara masyarakat Jepang yang memiliki hari perayaan Takeshima.

Kerentanan hubungan baik antar kedua negara, tidak tercermin dalam konteks sosial dan budaya masing-masing. Hal ini menjelaskan bahwa sebetulnya persoalan sengketa wilayah masih belum terselesaikan sampai pada persoalan terkecil, yaitu masyarakat kedua negara. Karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk menarik minat jika terdapat penelitian-penelitian lain yang ingin melanjutkan pembahasan sengketa wilayah antara Korea Selatan dan

Jepang dalam perspektif berbeda, terutama yang terkait masyarakat dan nasionalisme serta bagaimana kedaulatan merupakan hal yang harus dimiliki sebagai sebuah negara yang merdeka atas segala seluruh kepemilikan penuh suatu wilayah berdasarkan latar belakang historis dan rasa bentuk nasionalisme sebagai sebuah negara.

